

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DALAM Mendukung KETAHANAN
DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Andi Anita Purnama

NPP. 29.1362

*Asdaf Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: andianitapurnama02@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of caused by the emergence of COVID-19 as a global disaster that has the potential to disrupt the Regional Government Food Reserve (CPPD) management system and food security in Bulukumba Regency, South Sulawesi Province. **Purpose:** This study aims to know the management of the Regional Government Food Reserves (CPPD) and to determine the condition of food security during the COVID-19 pandemic in Bulukumba Regency, South Sulawesi Province. **Method:** This study uses qualitative method and analysis of the management stage according to George R. Terry Theory. The technique of collecting data are done by interviews (7 informant), observation, and documentation. **Result:** The findings are youth management in planning is quite good, organizing, actuating, and controlling of results are adequate, however, CPPD is able to maintain its availability during the COVID-19 pandemic. The findings obtained by the authors on the condition of food security in Bulukumba Regency in terms of availability are quite good, affordability and utilization are sufficient. **Conclusion:** the management of CPPD is still not running optimally. However, the community who received CPPD assistance felt helped by the existence of the CPPD. In addition, the condition of Bulukumba district's food security during the COVID-19 pandemic is still relatively resilient when viewed from the aspect of availability. However, when viewed from the aspect of affordability and utilization, it can be said that Bulukumba Regency is still not sufficiently resistant and even affected by the COVID-19 pandemic.

Keywords: Management, CPPD, Food Security

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yang ditimbulkan oleh kemunculan COVID-19 sebagai bencana global yang berpotensi mengganggu sistem pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan ketahanan pangan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis terhadap tahap pengelolaan menurut Teori George R. Terry. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (13 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pengelolaan

CPPD dalam perencanaan tergolong baik, pada pengorganisasian tergolong cukup, pada pelaksanaan tergolong cukup, dan pada pengendalian tergolong cukup, meskipun demikian CPPD mampu terjaga ketersediaannya di masa pandemi COVID-19. Adapun temuan yang diperoleh penulis terhadap kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bulukumba dari segi ketersediaan tergolong cukup baik, keterjangkauan tergolong cukup, dan pemanfaatan tergolong cukup. **Kesimpulan:** pengelolaan CPPD masih belum berjalan secara optimal. Meski demikian, masyarakat penerima bantuan CPPD merasa terbantu dengan adanya CPPD tersebut. Selain itu, kondisi ketahanan pangan kabupaten Bulukumba selama pandemi COVID-19 masih terbilang tahan jika ditinjau dari aspek ketersediaan. Namun, apabila ditinjau pada aspek keterjangkauan dan pemanfaatan dapat dikatakan Kabupaten Bulukumba masih belum cukup tahan bahkan terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19.

Kata kunci: Pengelolaan, CPPD, Ketahanan Pangan

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1. Latar Belakang

Dua orang warga depok yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19 pada Maret 2020 sebagai tanda munculnya COVID-19 di Indonesia. Langkah tegas pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19 baru terlihat setelah *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana pandemi global. Berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya membatasi mobilisasi atau pergerakan masyarakatnya sebagai salah satu wujud pelaksanaan fungsi perlindungan oleh pemerintah.

Kesehatan merupakan sektor yang paling terpuruk akibat pandemi COVID-19, disusul sektor ekonomi, hingga keseluruhan aspek kehidupan, termasuk sektor pangan. Meskipun tidak secara langsung, berangkat dari krisis ekonomi yang berhasil membuat harga pangan anjlok. Penyebabnya, permintaan menurun karena konsumsi non-rumah tangga tak berjalan. Daya beli masyarakat yang turun juga membuat petani sulit menjual hasil panennya.

Potensi ancaman krisis pangan sempat diperingatkan oleh Organisasi Pangan Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*). Menurutnya, kebijakan negara-negara untuk membatasi aktivitas masyarakatnya mengancam rantai pasokan pangan dunia. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan larangan perjalanan lintas negara maupun daerah. Sehingga produktivitas pangan tidak berjalan maksimal (Dkatadata.co.id, 2022).

Ketahanan pangan harus menjadi sesuatu yang pasti bagi Indonesia sebagai negara yang begitu besar dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Ketersediaan pangan bisa terwujud dengan meningkatkan produksi di dalam negeri, memperkuat pengelolaan cadangan pangan, serta memaksimalkan distribusi pangan guna mengurangi kesenjangan antara daerah yang dipicu oleh faktor produksi dan kebutuhan.

Guna menghadapi pandemi COVID-19 di bidang pangan, salah satu hal yang harus dimiliki dan diperkuat oleh setiap daerah adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Kewajiban ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, untuk lebih lanjut penyelenggaraan diatur dalam peraturan daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP), pemerintah daerah yang sudah menyelenggarakan CPPD pada tahun 2020 sebanyak 31 provinsi dengan 269 kabupaten/kota. Data tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang berjumlah 28 provinsi dengan 245 kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penyelenggara CPPD yang terbagi 18 kabupaten/kota dari 24 jumlah keseluruhan kabupaten/kota yang ada di

Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu dari 18 kabupaten/kota tersebut yang mengemban amanat terkait pengelolaan CPPD (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2021). Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Gangguan perekonomian daerah akibat berbagai bentuk pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas lokal/pusat dalam menanggulangi COVID-19 adalah contoh dari guncangan yang mempengaruhi kemampuan sistem pangan lokal untuk beroperasi. Seperti yang sering terjadi baik secara lokal, nasional, maupun global, ketersediaan beras yang surplus atau melebihi kebutuhan beras masyarakat tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat terbebas dari kelaparan dan kekurangan gizi. Volume beras yang begitu besar, apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah bagi pihak pemerintah daerah maupun masyarakat.

Minimnya tinjauan mengenai gangguan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada sistem pengelolaan cadangan pangan dan implikasinya terhadap ketahanan pangan daerah membuat peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan topik “Pengelolaan Cadangan Pangan dalam Mendukung Ketahanan Daerah pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan CPPD dan ketahanan pangan Kabupaten Bulukumba yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yaitu terkait kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan hingga sampai kepada perseorangan. Masalah yang paling utama saat ini adalah meningkatnya jumlah masyarakat miskin akibat pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh otoritas pusat maupun lokal. Data dari BPS Kabupaten Bulukumba menunjukkan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 7,10% per Maret 2020 (BPS Kabupaten Bulukumba, 2021). Data ini memberikan gambaran presentasi penduduk yang tergolong tidak memiliki daya beli memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, atau disebut sebagai masyarakat rawan pangan. Angka tersebut diperkirakan meningkat sejak belangsungnya pandemi COVID-19.

Dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat di Kabupaten Bulukumba dapat pula dilihat dari perkembangan inflasinya. Pada bulan Maret hingga Mei 2020 belum terlihat penurunan angka inflasi yang signifikan di Kabupaten Bulukumba. Penurunan angka inflasi baru mulai terlihat pada bulan juni, bahkan terjadi deflasi pada bulan juli dan agustus yaitu sebesar -0,01% dan -0,04% (BPS Kabupaten Bulukumba, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, daya beli masyarakat di Kabupaten Bulukumba baru mengalami penurunan drastis pada bulan juni hingga agustus 2020.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba sejak mewabahnya COVID-19 yaitu pada tahun 2020 untuk pertama kalinya di bawah 5% sejak beberapa tahun terakhir, yaitu sebesar 0,43% (BPS Kabupaten Bulukumba, 2021). Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang jauh melambat tak lepas dari dampak penyebaran COVID-19.

Pembangunan pertanian perlu diletakkan sebagai prioritas dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung ketahanan pangan daerah selama pandemi COVID-19. Mengingat tahun 2020 sektor pertanian yang paling berperan dalam pembentukan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bulukumba cukup signifikan yaitu mencapai 36,26% (BPS Kabupaten Bulukumba, 2021). Meskipun demikian, besarnya angka tersebut belum mampu menjamin akses masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengelolaan CPPD maupun ketahanan pangan masyarakat di tingkat daerah. Penelitian Fajar Adi Prakoso berjudul dampak *Coronavirus Disease (COVID-19)* Terhadap *Industri Food & Beverages* (Prakoso, 2020), menemukan bahwa penutupan tempat makan akibat kebijakan PSBB membuat penurunan terhadap pendapatan yang berakibat pada pengurangan karyawan, Perubahan pada pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dengan mengandalkan jasa delivery guna mengurangi aktivitas di luar rumah. Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien, Infrastruktur pertanian yang tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun, kegagalan produksi karena faktor iklim yang berdampak pada musim kering dan banjir. Penelitian Sabrina Sabila yang berjudul *Daya Dukung Pangan dalam Mendukung Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan*.menemukan bahwa untuk skala Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketersediaan pangan yang mencukupi. Namun masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang terindikasi defisit sehingga memerlukan dukungan atau masukan Kabupaten/Kota yang terindikasi surplus pangan (Sabila, 2020). Penelitian Suksio Rhozan Imana Maksu, Farhanuddin Jamanie, dan Anwar Alaydrus menemukan bahwa strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan belum terlaksana dengan baik. Terbukti dengan koordinasi yang masih buruk, kinerja aparat yang belum maksimal serta pengendalian di lapangan yang masih lemah. Namun kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dengan daerah produsen mampu meningkatkan jumlah cadangan pangan di Kota Samarinda (Maksu, Jamanie, & Alaydrus, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan terdiri dari dua konteks yakni terhadap cadangan pangan yang dimiliki pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota dan kondisi ketahanan pangan selama pandemic COVID-19 yang tentu berbeda dengan penelitian Prakoso, Sabila, maupun Rhozan dkk. Selain itu, pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari George R. Terry yang menyatakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen yang terjadi pada empat tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Adapun indikator untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan suatu daerah berpedoman dari pilar ketahanan pangan yang dirilis Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan kondisi ketahanan paangan di Kabupaten Bulukumba pada masa pandemi COVID-19.

II. METODE (5-10%)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melihat dari hubungan peneliti dengan yang diteliti, Sugiyono menganggap penelitian kualitatif memiliki sifat holistik dan lebih menjelaskan proses penelitian, sulit membedakan variabel dependen dan independennya karena terjalin hubungan interkatif antar variabel-variabel penelitian yang saling mempengaruhi (Sugiyono, 2015). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Yusuf, 2014).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang informan dengan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pemilihan informan berdasarkan maksud dan tujuan penelitian, menekankan pada keterwakilan untuk memperoleh informasi yang rinci dan kaya (Raco, 2010). Ketiga belas informan tersebut terdiri dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Kepala Bidang Keamanan Pangan, Kepala Seksi Cadangan Pangan, Kepala Seksi Distribusi & Harga Pangan, Kepala Seksi Promosi & Konsumsi Panganekaragaman Pangan, Kepala Seksi Kelembagaan & Pengendalian Keamanan Pangan, Kepala BULOG Cabang Bulukumba, Kepala Gudang BULOG Palambarae, Petani, Penerima bantuan CPPD, dan MKP BULOG. Adapun analisisnya menggunakan teori pengelolaan atau manajemen yang digagas oleh George R. Terry yang menyatakan bahwa pengelolaan dapat terjadi pada empat tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (Wijaya & Rifa'i, 2016). Analisis ketahanan pangan menggunakan pilar yang dirilis oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

3.1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Bulukumba

Analisis mengenai pengelolaan CPPD Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dirumuskan oleh George R Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang apabila dijabarkan sebagaimana subbab berikut.

3.1.1. Perencanaan

Membangun cadangan pangan daerah membutuhkan sebuah perencanaan terlebih dahulu dan harus melibatkan pemerintah daerah. Sebab, urusan pangan merupakan urusan konkuren yang berarti pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola cadangan pangan yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Kabupaten Bulukumba termasuk salah satu daerah yang mengemban amanat tersebut dan masih berlangsung hingga saat ini. Tujuan dari pengelolaan cadangan pangan daerah oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba dengan Subdivre BULOG dapat diketahui dari pernyataan informan selaku plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kasi Cadangan Pangan yang menyatakan bahwa cadangan pangan bertujuan untuk mengantisipasi atau menaggulangi kekurangan pangan yang diakibatkan oleh bencana alam, sosial, maupun gejolak harga pangan yang diakibatkan oleh kelebihan produksi pada waktu panen ataupun krisis pangan akibat kelangkaan pasokan.

Pengadaan CPPD dilaksanakan sepenuhnya oleh Subdivre BULOG dan disimpan di gudang penyimpanan BULOG, sebab Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki gudang untuk penyimpanan beras CPPD. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala BULOG Cabang Bulukumba bahwa pengadaan beras CPPD bersumber dari 11 mitra BULOG yang selanjutnya disebut Mitra Kerja Pengadaan (MKP). Diluar dari 11 mitra tersebut, BULOG tidak melakukan penyerapan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diperoleh informasi bahwa sifat dari CPPD ini condong sebagai bantuan. Maka diperlukan juga pendataan untuk masyarakat penerima bantuan tersebut. Pendataan terkait masyarakat mana sajakah yang berhak untuk menerima bantuan CPPD ini dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) sesuai dengan petunjuk teknisnya. Setelah itu, Dinsos menyurat ke Bupati beserta lampiran penerima bantuan CPPD. Hasil dari disposisi bupati kemudian

ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan. Tanpa adanya perintah dari Bupati melalui disposisi, CPPD tidak bisa untuk dilakukan pendistribusian.

3.1.2. Pengorganisasian

Pentingnya memaksimalkan pengelolaan dan penyelenggaraan CPPD disadari oleh pemerintah. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, untuk pengelolaan CPPD dinaungi dalam sebuah bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dengan sebanyak dua kepala seksi, diantaranya seksi distribusi dan harga pangan dan seksi cadangan pangan.

Secara umum, sesuai dengan hasil pengamatan peneliti selama berada di Dinas Ketahanan Pangan, pembagian tugas di Dinas Ketahanan Pangan sudah cukup sesuai dan memiliki pegawai yang berkompeten. Namun ada beberapa pegawai yang baru saja menempati posisi tersebut sehingga mereka masih perlu mempelajari terkait tugas dan fungsi amanah yang diemban. Selain itu, peneliti menemukan informasi bahwa kepala yang membawahi bidang Distribusi dan Cadangan Pangan merupakan seorang lulusan pertanian dan mengurus bidang tersebut selama lebih dari 4 tahun. Koordinasi internal dalam pengelolaan CPPD di Dinas Ketahanan Pangan sudah berlangsung selama 4 tahun dan mampu menjamin terwujudnya ketersediaan pasokan yang dapat disalurkan sewaktu-waktu jika terjadi peristiwa luar biasa. Namun di sisi lain, Kepala Seksi Cadangan Pangan tidak memiliki staf untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam pengelolaan CPPD. Selain itu, tidak ada kejelasan terkait biaya angkut dari penggiling ke gudang BULOG yang mestinya itu menjadi tanggungan dinas. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut, pegawai Dinas Ketahanan Pangan harus menggunakan uang pribadinya untuk menutupi biaya angkut tersebut. Selain internal, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan koordinasi dengan Subdivre BULOG, Dinas Pertanian, Dinas Pertanahan, BPBD, camat dan juga Dinas Sosial dalam pengelolaan CPPD. sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Distribusi dan Cadangan Pangan.

3.1.3. Pelaksanaan

CPPD dikelola dengan mengacu pada tiga tahap yaitu pada saat pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Pada tahap pengadaan dilakukan dengan membangun sebuah mitra dengan penggiling atau GAPOKTAN. Setelah itu, CPPD di simpan pada gudang BULOG dan disalurkan ketika terjadi peristiwa kerawanan akibat bencana ataupun paceklik.

Pengadaan CPPD sebagaimana yang dimaksud melibatkan BULOG dalam hal penyerapan beras secara langsung kepada mitra BULOG yang sudah memenuhi syarat sebagai MKP. Adapun mekanisme pengadaan CPPD yang peneliti peroleh dari penjelasan Kepala BULOG Cabang Bulukumba dan Kepala Gudang BULOG Palambara. Dari pernyataan informan tersebut diketahui bahwa BULOG hanya menerima beras dari MKP yang berjumlah 11 mitra yang tersebar di wilayah Kabupaten Bulukumba dengan patokan HPP sesuai dengan Permendag 24/2020. Diluar dari MKP tersebut, BULOG tidak melakukan penyerapan beras. Sehingga diketahui BULOG tidak menyerap seluruh hasil panen dari petani lokal di Kabupaten Bulukumba untuk mengisi stok CPPD Kabupaten Bulukumba,

Informasi yang peneliti peroleh dari Kasi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, stok CPPD di Gudang Subdivre BULOG berjumlah 76.000 kg. Daerah Kabupaten Bulukumba hanya mampu menganggarkan penyerapan untuk 76.000 Kg beras dan dinilai masih kurang mampu untukantisipasi kerawanan dan menjaga stabilitas pasokan. Sehingga BULOG masih melakukan penyerapan dengan menggunakan APBN untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas. Namun untuk menggunakannya memerlukan persetujuan pusat untuk melepas atau mendistribusikan beras tersebut. Beras yang bersumber dari APBN tidak bisa digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, sebab hal tersebut harus menunggu persetujuan dari pusat.

Dari beberapa informan, diperoleh informasi bahwa pengadaan CPPD oleh BULOG setiap tahunnya dilakukan selama dua semester dan menyesuaikan waktu panen. Panen pada bulan Maret merupakan pengadaan yang paling besar dilakukan karena pada bulan tersebut produksi petani sangat besar sehingga pengadaannya juga dilakukan dengan volume yang besar. Cadangan pangan yang dikuasai pemerintah disajikan dalam bentuk beras dan tidak menyimpan dalam bentuk gabah, termasuk CPPD. Beras yang disimpan adalah beras dengan kualitas medium dengan harga patokan ialah pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam Permendag 24/2020.

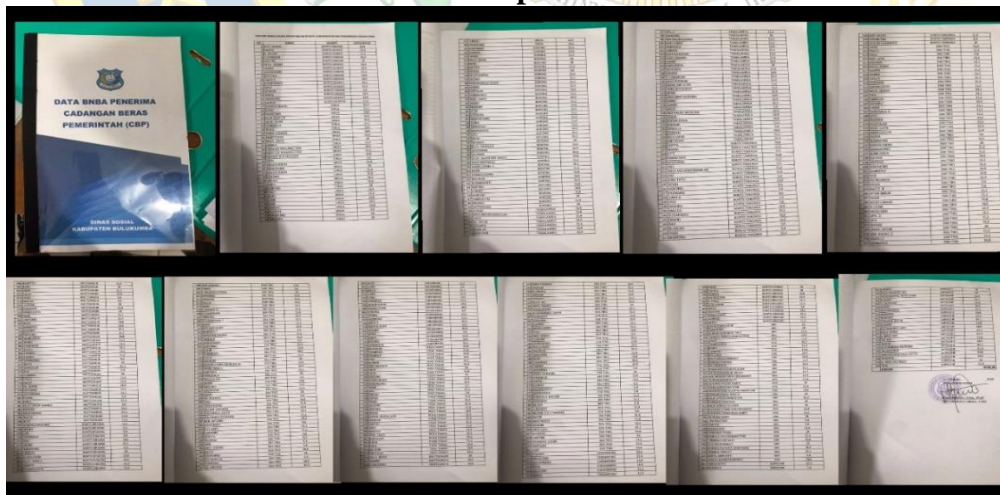
Dinas Ketahanan Pangan melibatkan BULOG dalam penyimpanan CPPD. Hal ini dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan tidak dapat menyimpan CPPD-nya sendiri dikarenakan tidak tersedianya gudang atau lahan untuk menyimpan CPPD tersebut. Ketika CPPD tidak digunakan dalam waktu satu tahun maka pihak Dinas Ketahanan Pangan akan dikenakan denda berupa biaya sewa gudang. Selama CPPD disimpan pada gudang BULOG, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan untuk perawatan beras guna mengantisipasi penurunan mutu atau kualitas yang diakibatkan oleh serangan hama. Kegiatan yang dimaksud adalah fumigasi dan spraying. Saat berada di gudang BULOG, peneliti menemukan semua beras yang ada digudang sedang dilakukan fumigasi. Kegiatan fumigasi tersebut berlangsung selama 1 minggu. Untuk satu karung beras memiliki berat sebesar 50 Kg yang ditumpuk di atas flonder menggunakan system kunci lima.

Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan mengatakan bahwa penyaluran CPPD dilakukan apabila pihak Dinas Ketahanan Pangan sudah menerima desposisi Bupati. Setelah itu, Dinas Ketahanan Pangan mengeluarkan surat perintah logistik kepada Kasubdivre yang membawahi wilayah Kabupaten Bulukumba. Kemudian barulah BULOG mengeluarkan beras tersebut untuk didistribusikan sesuai dengan titik bagi. Sepanjang 3 tahun terakhir, CPPD disalurkan hanya untuk sebagai bantuan terhadap korban bencana, seperti kebakaran, penanganan COVID-19, dan puting beliung. Terhitung sebanyak 330 gr perkepala menerima bantuan CPPD ini yang kemudian dikalikan selama 3 bulan dengan harapan setelah 3 bulan tersebut rumah tangga tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan pangannya terutama beras.

Adapun data penerima bantuan CPPD Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.

Data Penerima Bantuan CPPD Kabupaten Bulukumba



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2022

Melalui data dokumentasi di atas yang peneliti peroleh dari Dinas Ketahanan Pangan, sebanyak 520 RTS yang menerima bantuan CPPD yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba. Masing-masing RTS menerima jumlah CPPD yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah kepala yang ada pada RTS tersebut. Jumlah keseluruhan Bantuan CPPD yang disalurkan untuk penanganan COVID-19 sebanyak 9.730 Kg.

3.1.4. Pengendalian

Pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan CPPD meliputi jumlah stok tersisa, perawatan beras CPPD selama berada di Gudang BULOG, dan pendistribusian CPPD sampai kepada penerima. Diketahui dari Kasi Cadangan Pangan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dibuat dalam bentuk laporan bulan berjalan yang meliputi stok awal, stok masuk, dan stok keluar. Selain itu, tim dari Dinas Ketahanan Pangan juga rutin melakukan pengecekan stok dan perawatan langsung ke Gudang BULOG.

Penulis juga memperoleh informasi bahwa petani yang tergabung dengan MKP BULOG merasa bahwa penyerapan oleh BULOG cukup bermanfaat dalam membantu petani dari harga anjlok. Selain itu, harga yang sudah ditetapkan pusat terhadap beras BULOG yang dikenal dengan HPP dapat menjadi perbandingan bagi petani untuk melihat pasar yang lebih menguntungkan.

Untuk mengetahui kualitas dari beras CPPD penulis melakukan wawancara dengan beberapa penerima bantuan beras CPPD. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa masyarakat penerima bantuan CPPD menerima beras dengan kondisi ditemukan kutu pada beras tersebut. Hal ini menandakan bahwa masih kurang maksimalnya perawatan yang dilakukan oleh pihak Subdivre BULOG dalam menjaga kualitas berasnya. Namun hal itu masih bisa dimaklumi oleh penerima dan mereka cukup senang dengan bantuan tersebut. Selain itu, mereka yakin CPPD tersebut sudah cukup untuk membantu pemenuhan makan selama pembatasan kegiatan keluar rumah masih berlangsung.

3.2. Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Bulukumba Selama Pandemi COVID-19

Penulis dalam mengidentifikasi kondisi ketahanan pangan komoditas beras Kabupaten Bulukumba menggunakan tiga pilar, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan yang apabila dijabarkan sebagaimana subbab berikut.

3.2.1 Ketersediaan

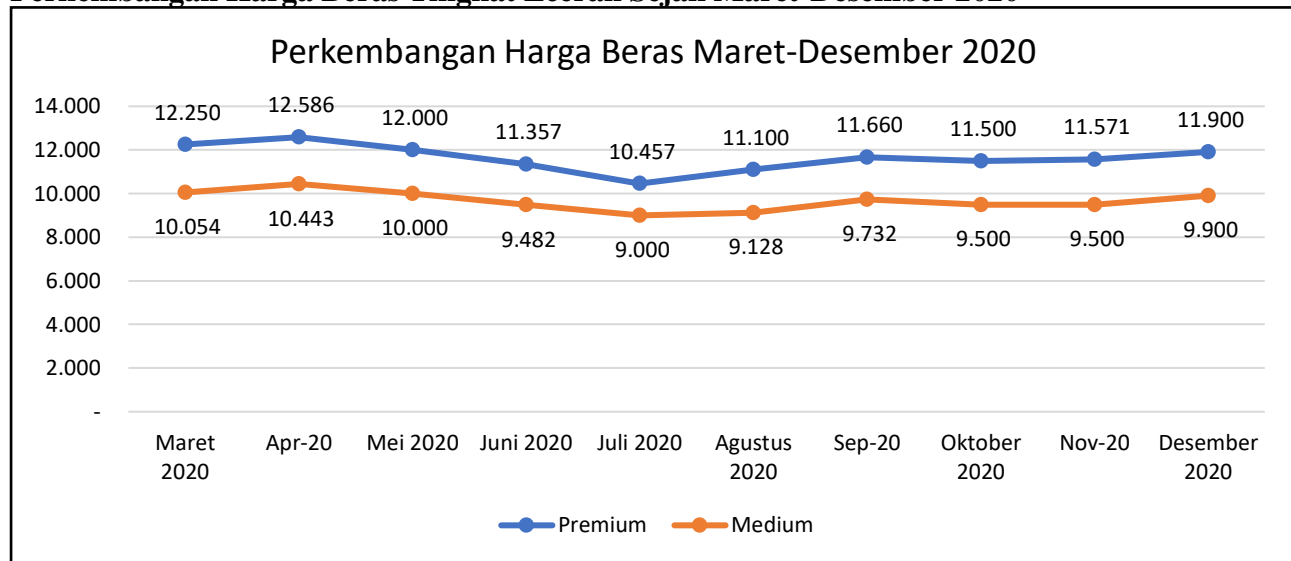
Ketersediaan beras di Kabupaten Bulukumba berasal dari produksi padi lokal dimana hasil produksi padi di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 sebesar 243.071,69 ton. Jumlah tersebut mengalami penurunan produksi dari tahun 2020 yang mencapai 263.749,66 ton (FSVA Kabupaten Bulukumba, 2022). Selain itu, ketersediaan beras di Kabupaten Bulukumba juga didukung dengan penguatan cadangan pangan baik yang dikelola oleh BULOG sebagai CPP, CPPD, ataupun yang tersimpan sebagai cadangan pangan masyarakat yang lebih memberikan kemudahan akses sampai pada tingkat rumah tangga. Sehingga di masa Pandemi COVID-19 ini dapat dikatakan ketersediaan pangan di Kabupaten Bulukumba masih terbilang aman.

3.2.2. Keterjangkauan

Setelah mampu mewujudkan ketersediannya pangan, maka tahap berikutnya adalah bagaimana agar pangan tersebut dijangkau dan dikonsumsi bagi semua konsumen yaitu masyarakat sampai pada tingkat rumah tangga. Stabilisasi pasokan dan harga pangan erat kaitannya dengan distribusi. Pangan harus tersedia secara lancar dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba. Terkait harga beras selama pandemi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1.

Perkembangan Harga Beras Tingkat Eceran Sejak Maret-Desember 2020



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

Diketahui dari grafik di atas, harga beras medium menunjukkan kecenderungan yang lebih menarik dibandingkan dengan harga beras premium. Sejak Maret sampai Mei 2020 beras medium menunjukkan harga di atas Rp 10.000 dan di atas Rp 12.000 untuk beras Premium. Sedangkan harga paling rendah dari beras medium dan premium ditunjukkan pada Juli sebesar Rp 9.000 dan Rp 10.457. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Distribusi dan Harga Pangan bahwa harga beras di Kabupaten Bulukumba yang demikian dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya dikarenakan terlalu banyak pihak yang terlibat dalam pedistribusian beras hingga sampai kepada konsumen. Rantai distribusi beras dari produsen sampai ke pasar tujuan tidak begitu banyak mengalami perubahan sejak mewabahnya pandemi COVID-19. Kecuali pada proses atau pola distribusi dari pasar atau pedangan pengecer sampai kepada konsumen yaitu masyarakat Kabupaten Bulukumba.

Petani sawah di Kabupaten Bulukumba mengeluhkan hal yang sama bahwa pandemi COVID-19 memperparah kondisi para petani dengan penjualan gabah yang murah dan jauh dari harga yang dipatok oleh pemerintah. Petani di Kabupaten Bulukumba juga tidak mengetahui cara untuk menjual beras mereka kepada BULOG. Sehingga yang menjadi pilihan petani adalah menjual berasnya kepada pihak penggiling dengan harga murah.

Panjangnya sistem logistik beras di Kabupaten Bulukumba sebelum pandemi hingga masa pemulihan saat ini tidak begitu mengalami perubahan signifikan. Terlihat dari banyaknya petani yang masih memilih pemasaran dengan cara konvensional di tengah meraknya pemasaran menggunakan sistem e-commerce. Padahal, di era pandemi seperti saat ini banyak orang yang memilih berbelanja secara online dibandingkan dengan berkunjung langsung ke lokasi perbelanjaan. Selain itu, dengan menggunakan sistem e-commerce petani bisa menjual langsung hasil panennya sehingga memutus rantai distribusi pangan yang sangat panjang tersebut.

3.2.3. Pemanfaatan

Ketersediaan dan keterjangkauan pangan tidak bisa menjadi tolak ukur dalam menjamin kualitas konsumsi pangan. Sehingga dari segi pemanfaatan pangan, dapat dilihat dari perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bulukumba 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 1.**Perkembangan Skor PPH Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021**

Tahun	Skor PPH
2017	85,0
2018	86,5
2019	87,0
2020	87,3
2021	86,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor PPH Kabupaten Bulukumba dari tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan terkecuali pada tahun 2021 yang mengalami penurunan dari 87,3 pada tahun sebelumnya menurun menjadi 86,9 pada tahun 2021. Meski begitu, skor PPH Kabupaten Bulukumba belum pernah mencapai skor maksimal (100) terhadap pola konsumsi pangan di Kabupaten Bulukumba sepanjang 5 tahun terakhir.

Berdasarkan pendapat dari beberapa informan dan beberapa masyarakat yang peneliti temukan di lapangan diperoleh informasi bahwa beras merupakan pangan yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba dan tidak mengalami perubahan konsumsi sejak mewabahnya COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi masyarakat Kabupaten Bulukumba untuk tetap mengonsumsi beras sehari-harinya. Sebab, masyarakat Kabupaten Bulukumba masih menganut paham “belum makan kalau bukan nasi”.

Didukung dengan data yang peneliti peroleh berikut terlihat bahwa memang komoditas padi-padian sudah mencapai skor maksimal yang berarti konsumsi beras masyarakat Kabupaten Bulukumba masih terpenuhi sejak pandemi COVID-19. Disusul komoditas pangan hewani dan komoditas minyak dan lemak. Adapun skor PPH Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.**Skor PPH Kabupaten Bulukumba Tahun 2021**

No.	Kelompok Pangan	Kalori	AKE (%)	Skor Maksimal	Skor PPH
1	Padi-padian	1210,08	56,3	25	25,0
2	Umbi-umbian	27,8	1,3	2,5	0,6
3	Pangan Hewani	330,3	15,4	24	24,0
4	Minyak dan lemak	321,7	15,0	5	5
5	Buah/biji berminyak	27,3	1,3	1	0,6
6	Kacang-kacang	52,6	2,4	10	4,9
7	Gula	85,6	4,0	2,5	2,0
8	Sayur dan buah	106,2	4,9	30	24,7
9	Lain-lain	37,6	1,8	0	0
Total		2200	102,3	100	86,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan skor PPH yang tidak begitu terpaut jauh dengan skor maksimal namun masih ditemukan perbedaan yang cukup signifikan. Terlihat dari kelompok pangan yang telah memenuhi skor maksimal yang berarti tingkat konsumsi masyarakat pada kelompok pangan tersebut

telah terpenuhi, yaitu kelompok padi-padian, kelompok pangan hewani serta kelompok minyak dan lemak.

Jumlah balita stunting merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan pada level rumah tangga. Adapun Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Bulukumba selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.

Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Bulukumba Tiga Tahun Terakhir

No.	Kecamatan	Jumlah Stunting		
		2019	2020	2021
1	Kindang	126	145	51
2	Herlang	67	62	49
3	Bontobahari	24	206	84
4	Gantarang	186	518	745
5	Kajang	138	402	143
6	Ujung Loe	77	364	340
7	Bulukumba	63	111	181
8	Rilau Ale	92	112	75
9	Bonto Tiro	63	110	122
10	Ujung Bulu	79	33	41
Kabupaten		915	2063	1831

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa balita di bawah 5 tahun yang mengalami stunting di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 dan 2021 lebih besar jumlahnya dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebelum adanya pandemi COVID-19, yaitu sebanyak 2.063 balita pada tahun 2020 dan sebanyak 1.831 balita pada tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021, jumlah tersebut masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan pada saat sebelum adanya pandemi COVID-19.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hadirnya CPPD cukup mendatangkan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bulukumba terkhusus masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Ditambah lagi sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba merupakan sektor yang paling menjadi perhatian pemerintah pusat, sebab akan dibangunnya lumbung pangan nasional yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba. Penulis menemukan temuan penting yakni tutupnya restaurant atau warung di Kabupaten Bulukumba juga mempengaruhi penyerapan pangan, sebab restaurant atau warung merupakan salah satu konsumen besar terhadap pangan beras. Sama halnya dengan temuan Fajar Adi Prakoso bahwa tutupnya industri *food* dan *bverages* akibat kebijakan PSBB membuat penurunan terhadap pendapatan yang berakibat pada pengurangan karyawan, Perubahan pada pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dengan mengandalkan jasa *delivery* (Prakoso, 2020). Jasa *delivery* kian marak di Kabupaten Bulukumba sejak pandemi COVID-19.

Nasi sudah menjadi makanan pokok bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba. Sehingga meskipun adanya pandemi COVID-19, masyarakat masih tetap mengonsumsi nasi. Nasi yang merupakan hasil olahan dari beras tersebut menunjukkan kondisi surplus di Kabupaten Bulukumba. Meski demikian,

hasil produksi yang surplus tersebut tidak diperoleh dari semua kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Sehingga untuk menopang ketersediaan beras di daerah yang defisit, dilakukan distribusi dari daerah yang surplus sesuai dengan hasil penelitian Sabrina Sabila (Sabrina, 2020).

Adanya CPPD ini diharapkan secara terus menerus tersedia dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Subdivre BULOG. Sehingga mampu menjadi pertolongan yang bersifat cepat dan tepat bagi masyarakat apabila terjadi kerawanan, baik yang bersifat tersier ataupun transien. Seperti penelitian Rhozan dkk yang menemukan bahwa Dinas Ketahanan Pangan memerlukan SDM yang berkompeten untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. (Rhozan dkk, 2019)

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat pada penyaluran CPPD dimana biaya angkut dari gudang ke titik bagi belum memiliki regulasi yang jelas, sehingga untuk menyalurkannya masih menggunakan dana pribadi yang bersumber dari pegawai setempat.

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan CPPD Kabupaten Bulukumba oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Subdivre BULOG dinilai masih belum optimal. Masih ada beberapa masalah yang terkait dengan pengelolaan CPPD yaitu BULOG yang tidak bisa menyerap hasil panen petani di luar dari MKP BULOG, belum tersedianya staf pada bidang yang mengurus CPPD, penataan pegawai dinilai masih kurang tepat pada bidang tertentu, biaya angkut, dan penurunan mutu beras yang diterima oleh masyarakat. Meski demikian, CPPD berhasil mendatangkan manfaat secara langsung oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dibangunnya CPPD ini, yaitu untuk menjamin ketersediaan beras sebagai antisipasi keadaan darurat akibat adanya bencana. Selain itu, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bulukumba selama pandemi COVID-19 termasuk kategori tahan apabila ditinjau dari aspek ketersediaan. Namun apabila ditinjau pada aspek keterjangkauan dan pemanfaatan dapat dikatakan Kabupaten Bulukumba belum cukup tahan bahkan terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19. Guna meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bulukumba, pemerintah daerah harus memulai dari tingkat rumah tangga seperti membuat program yang mampu menurunkan jumlah *stunting* di Kabupaten Bulukumba. Sehingga mampu memutus lingkaran kemiskinan yang merupakan masalah penting yang belum terselesaikan di Kabupaten Bulukumba.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Bulukumba untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian . (2021). *Laporan Kinerja 2021 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan*: http://badanpangan.go.id/storage/app/media/2022/LAKIN%20KKP%202021__1.pdf
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2019). *Indeks Ketahanan Pangan Indonesia*: <http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Bahan%202020/IKP%202019%20FINAL.pdf>
- BPS Kabupaten Bulukumba. (2021). *Persentase Penduduk Miskin (Persen) 2019-2021*: <https://bulukumbakab.bps.go.id/indicator/23/81/1/persentase-penduduk-miskin.html>
- BPS Kabupaten Bulukumba. (2021). *Berita Resmi Statistik*: <https://bulukumbakab.bps.go.id/>
- BPS Kabupaten Bulukumba. (2021). *Statistik Daerah Kabupaten Bulukumba*: <https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MzdlMzg0NmFINWZiMjA5ZWQxODQwMDFl&xzmn=aHR0cHM6Ly9idWx1a3VtYmFrYWUybnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjEvMTIvMjgvMzdlMzg0NmFINWZiMjA5ZWQxODQwMDFl3N0YXRpc3RpaY1kYWVvYmVgta2FidXBhdGVuLWJ1bHVrdW1>
- Dkatadata.co.id. (2022). *Jokowi Waspadai Krisis Pangan, Ini Peringatan FAO saat Pandemi Corona*: <https://katadata.co.id/yulawati/berita/5e9a41c99400f/jokowi-waspadai-krisis-pangan-ini-peringatan-fao-saat-pandemi-corona>
- Maksum, S. R., Jamanie, F., & Alaydrus, A. (2019). *Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Kota Samarinda*. eJournal Pemerintahan Integratif, 7(4).
- Prakoso, F. A. (2020). *Dampak Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Industri Food & Beverages*. Jurnal Manajemen Bisnis (JMB), 1-6.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo.
- Sabila, S. (2020). *Daya Dukung Pangan Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Tanah Dan Sumber Daya Lahan, 7(1).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.